

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat ekonomi bawah dan menengah, pemerintah mempunyai peran yang sangat besar untuk mendirikan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman modal. Di Indonesia lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Dalam memacu perkembangan kegiatan perekonomian Indonesia, peranan perbankan sangatlah berpengaruh dalam menopang kegiatan perekonomian baik dalam sektor industri, perdagangan dan dunia usaha maupun jasa lainnya. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. “Perbankan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Salah satu tujuan pemerintah yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945 yaitu mensejahterakan masyarakat diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang papan atau perumahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman. “Rumah merupakan bangunan yang

berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian bagi pembinaan keluarga”. hal ini membuat pihak perbankan membuat program atau produk perbankan yang dinamakan dengan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah). Prinsip KPR yaitu membiayai terlebih dahulu biaya pembelian atau pembangunan, selanjutnya nasabah membayar dengan cara dicicil dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan awal antara nasabah dengan pihak perbankan dalam melunasinya nasabah harus membayar biaya pokok dan bunga yang telah ditetapkan oleh perbankan.

Melihat perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin pesat, maka kegiatan dan masalah yang dihadapi oleh suatu perbankan semakin kompleks, baik masalah internal ataupun masalah eksternal dari perbankan tersebut. Ditambah lagi dengan fenomena yang terjadi saat ini yaitu adanya virus covid-19 atau sering disebut dengan virus corona, virus corona adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan kementerian kesehatan Indonesia, perkembangan kasus virus covid-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan *Municipal Healtyh Committe* mengeluarkan pernyataan. “*Urgent notice on the treatment of pneumonia of unknow cause*”. Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang terkena virus Covid-19, salah satunya yaitu negara Indonesia. Di Indonesia membawa dampak negatif dalam berbagai bidang diantaranya dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, khususnya ekonomi. Sehingga semakin sulit bagi pihak pimpinan untuk melaksanakan

pengawasan atau mengkoordinir secara langsung terhadap seluruh aktivitas perbankan. Dengan demikian diperlukan adanya alat kontrol bagi perbankan yaitu pengendalian internal.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perbankan harus didukung dengan suatu pengendalian internal. dengan adanya pengendalian internal yang diterapkan dan dirancang dengan baik oleh perbankan, maka semua data-data yang disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan terjaga dan terjamin keandalannya. Pengendalian internal yang kurang baik akan menimbulkan masalah-masalah, seperti kurangnya kedisiplinan karyawan dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak internal perbankan serta adanya rangkap jabatan.

Untuk meminimalisir masalah-masalah yang kemungkinan terjadi di perusahaan, maka perlu dibuat pengendalian internal yang memadai yang mampu menyediakan informasi yang dapat dipercaya, dapat diuji, dan dapat diyakini kebenarannya agar dapat meningkatkan efektivitas perbankan, mengamankan harta kekayaan perbankan, melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan perbankan, serta

menciptakan kelancaran terhadap semua aktivitas perbankan dalam memperoleh pendapatan.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung merupakan Bank yang pada awal didirikan selalu konsisten dan memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat ekonomi bawah, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil maupun menengah. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung melalui program KPR BRI memberikan layanan Kredit Pemilikan Rumah yang dananya dapat digunakan untuk pembangunan, pembelian, renovasi ataupun takeover property impian. Penyaluran kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung pasti memiliki risiko yang akan terjadi. Adapun risiko yang sering di hadapi yakni wanprestasi, dengan demikian perlu adanya pengendalian internal yang baik dari pihak manajemen perusahaan terhadap prosedur pemberian KPR Pada Bank Rakyat Indonesia.

Peran pengendalian internal sangatlah diperlukan karena aktivitas perbankan dapat berjalan dengan kondusif apabila didukung dengan pengendalian internal pemberian kpr. Sistem pengendalian Internal pemberian kpr merupakan kunci jawaban dalam menangani masalah yang terjadi. Berdasarkan SE No.5/22/DPNP, dengan terselenggaranya pengendalian internal pemberian kpr yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam lembaga

tersebut. Begitupun pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung keberadaan pengendalian internal pemberian kpr diharapkan dapat menjaga kekayaan dan catatan perbankan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dipatuhinya kebijakan manajemen serta mendorong efisiensi.

Pengendalian Internal pemberian KPR pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung diduga belum optimal, karena dalam menyeleksi permohonan debitur atau pengajuan KPR masih belum optimal. Pada dasarnya kegiatan perkreditan harus sesuai dengan standar ketentuan sistem prosedur pemberian kredit dan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, namun kenyataannya dijumpai masih banyak kredit bermasalah yang ditunjukan dengan angka tunggakan kredit tiap tahun.

Berikut data pemberian KPR dan Jumlah kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 1. 1**

**Data Pemberian Kredit KPR pada PT. Bank BRI Cabang Dewi Sartika  
Periode 2016-2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Data Pemberian<br/>KPR</b> | <b>Jumlah Kredit<br/>Macet</b> | <b>Persentase</b> | <b>Ket</b> |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| 2016         | Rp 181.404.917.000            | Rp 2.634.881.000               | 1.45%             | -          |
| 2017         | Rp 244.968.194.000            | Rp 5.482.213.000               | 2.24%             | Naik       |

| Tahun | Data Pemberian<br>KPR | Jumlah Kredit<br>Macet | Persentase | Ket   |
|-------|-----------------------|------------------------|------------|-------|
| 2018  | Rp 215.798.408.000    | Rp 3.360.923.000       | 1.56%      | Turun |
| 2019  | Rp 138.468.262.000    | Rp 1.764.557.000       | 1.27%      | Turun |
| 2020  | Rp 198.526.641.000    | Rp 3.114.628.000       | 1.57%      | Naik  |
| 2021  | Rp 180.109.999.665    | Rp 3.112.560.000       | 1.72%      | Naik  |

Sumber: Divisi Pemberian KPR Bank BRI Cabang Dewi Sartika

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui jumlah pemberian KPR PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung pada tahun 2016 sebesar Rp 181.404.917.000 dengan jumlah kredit macet sebesar Rp 2.634.881.000 diduga sementara terjadi kredit macet karena lemahnya sistem administrasi. Pada tahun 2017 sebesar Rp 244.968.194.000 dengan jumlah kredit macet sebesar Rp 5.4882.213.000, diduga sementara untuk tahun 2017 kredit macet disebabkan faktor Ekspansif dalam mengejar target penyaluran kpr sehingga mengabaikan tingkat kehati-hatian. Pada tahun 2018 sebesar Rp 215.798.408.000 dengan jumlah kredit macet sebesar Rp 3.360.923.000 diduga sementara kredit macet disebabkan oleh lingkungan pengendalian internal bank BRI dalam menganalisis Pemberian kpr kurang optimal, pada tahun 2019 sebesar Rp 138.468.262.000 dengan jumlah kredit macet sebesar Rp 1.764.557.000 diduga karena lemahnya dalam *monitoring*, pada tahun 2020 sebesar Rp 198.526.641.000 dengan jumlah kredit macet sebesar Rp

3.144.628.000 diduga sementara terjadi akibat faktor eksternal atau debitur yang mengalami penurunan dalam perekonomiannya akibat pandemi covid-19. Pada tahun 2021 sebesar Rp 180.109.999.665 dengan jumlah kredit macet sebesar Rp 3.112.560.000 masih diduga sementara terjadi kredit macet karena adanya faktor eksternal yaitu pandemi covid-19, menyebabkan beberapa debitur yang memiliki usaha atau sumber pendapatan dari industri pariwisata mengalami pada saat pencairan dana bank terlalu lama dalam pencairan sehingga berakibat pada nasabah dalam perencanaan anggaran pembelian kpr. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet diatas disebabkan oleh banyak faktor yang belum dapat dikelola dengan baik oleh pihak perbankan. Dari data diatas dapat dilihat terjadi pemberian KPR tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp 244.968.194.000 dan pemberian KPR terendah pada tahun 2019 sebesar Rp 138.468.262.000. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung untuk kredit macet setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan (Fluktuasi). Pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan dan pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 kredit macet mengalami kenaikan. Dari data diatas dapat diketahui bahwa, pengendalian internal pemberian KPR pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung belum optimal yang diduga dipengaruhi oleh Sistem Informasi Akuntansi pemberian kpr yang belum optimal.

Menurut **Azhar Susanto (2013:117)** yang menyatakan bahwa, “Sistem Informasi Akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin bahwa pengendalian intern bekerja sesuai dengan yang seharusnya sehingga risiko terhadap penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dihindari”.

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak manajemen perbankan. Sistem informasi akuntansi sangat bermanfaat untuk mengambil keputusan bagi pihak manajemen perbankan, meningkatkan kualitas, mengurangi cost, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kinerja perbankan.

**Tabel 1. 2**

**Data Pra Survey Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. BRI Cabang Dewi Sartika Bandung Periode 2016-2021**

| No | Dimensi                       | Skor | Kategori      |
|----|-------------------------------|------|---------------|
| 1  | Perangkat Keras<br>(Hardware) | 3,2  | Cukup<br>Baik |
| 2  | Perangkat Lunak<br>(Software) | 3,0  | Cukup<br>Baik |



| No | Dimensi   | Skor       | Kategori      |
|----|---|------------|---------------|
| 3  | Manusia (Brainware)                               | 3,3        | Cukup<br>Baik |
| 4  | Prosedur (Procedure)                              | 3,2        | Cukup<br>Baik |
| 5  | Basis Data (Database)                             | 3,1        | Cukup<br>Baik |
| 6  | Jaringan Komunikasi<br>(Communication<br>Network) | 3,1        | Cukup<br>Baik |
|    | <b>Rata-Rata</b>                                  | <b>3,1</b> | Cukup<br>Baik |

Sumber: Hasil olah data kuesioner Pra-survey oleh penulis (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa sistem informasi akuntansi pemberian kpr pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung memperoleh skor rata-rata 3,1 dengan kategori cukup baik. Adapun dimensi perangkat keras (hardware) memperoleh skor 3,2 dengan kategori cukup baik karena masih banyak ditemukan komputer yang rusak. Pada dimensi perangkat lunak (Software) memperoleh skor 3,0 dengan kategori cukup baik karena masih mengalami kendala seperti gangguan sinyal, deadlock, RAM dan ROM. Pada dimensi manusia (Brainware) memperoleh skor 3,3 dengan kategori cukup baik dimana pada

saat pencairan dana tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan dengan pihak nasabah dan analisis pemberian kpr kurang optimal. Pada dimensi prosedur (Procedure) memperoleh skor 3,2 dengan kategori cukup baik dimana masih banyak ditemukan dimana debitur tidak berdomisili yang sama dengan KCP berada. Pada dimensi Basis Data (Database) memperoleh skor 3,1 dengan kategori cukup baik dimana masih ada keterlambatan membuat database. Pada dimensi jaringan komunikasi (Communication Network) memperoleh skor 3,1 dengan kategori cukup baik dilihat dari aplikasi yang masih terbatas untuk diakses. Dari data diatas dapat diketahui bahwa, sistem informasi akuntansi pemberian kpr pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung belum optimal.

Menurut **Krismiadji (2010:383)** "Jika sistem informasi akuntansi dirancang dengan baik, maka pengendalian yang melekat akan memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian tercapai".

Sistem informasi akuntansi pemberian kpr dengan pengendalian internal pemberian kpr harus bekerja dan berjalan bersama-sama agar tujuan perbankan dapat tercapai dengan efektif, efisien. Baik buruknya sistem informasi akuntansi pemberian kpr sangat mempengaruhi pengendalian internal pemberian kpr pada perbankan. Dengan menerapkan sistem informasi akuntansi pemberian kpr dan pengendalian internal pemberian kpr maka perbankan dapat mengurangi resiko kredit macet yang kemungkinan dapat terjadi dimasa yang akan datang.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kpr Terhadap Pengendalian Internal Pemberian Kpr Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Akuntansi Pemberian KPR pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung belum optimal.
2. Pengendalian Internal Pemberian KPR pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung belum optimal.
3. Kurangnya kemampuan pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung dalam menganalisis pemberian kredit.
4. Sistem Aplikasi dalam Pemberian KPR pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung Belum Optimal.
5. Monitoring Pemberian Kredit kepada debitur yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung belum optimal.
6. Banyaknya debitur yang tidak membayar angsuran kredit akibat pandemi Covid-19 sehingga terjadinya kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Dewi Sartika Bandung.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis melakukan pembatasan masalah agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih spesifik dan penelitian tidak menyimpang dari tujuan, serta agar menghasilkan penelitian yang lebih efektif. Masalah yang menjadi pilihan untuk diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh sistem informasi akuntansi pemberian kpr terhadap pengendalian internal pemberian kpr pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka dapat dirumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Pemberian KPR pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung.
2. Bagaimana Pengendalian Internal Pemberian KPR pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi pemberian KPR terhadap pengendalian internal pemberian KPR pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung.

## 1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi pemberian KPR terhadap pengendalian internal pemberian KPR pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Dewi Sartika Bandung. Sehingga permasalahan ini dapat digambarkan dengan jelas melalui informasi yang diperoleh.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Sistem Informasi Akuntansi Pemberian KPR pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung.
2. Pengendalian Internal Pemberian KPR pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung.
3. Besarnya pengaruh sistem informasi akuntansi pemberian KPR terhadap pengendalian internal pemberian KPR pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung.

## 1.6 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antarlain:

### 1.6.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang konsep peranan sistem informasi akuntansi pemberian KPR dan Pengendalian Internal pemberian KPR pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan pemikiran berupa saran-saran positif yang sifatnya mengarah pada perbaikan pemberian KPR bagi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Dewi Sartika Bandung, baik berupa masukan dan pertimbangan bagi pihak manajemen bank dengan harapan dapat bermanfaat.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta dasar untuk dilakukannya suatu penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan mendalam, serta sebagai bahan panduan dan sumber informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian.

### 1.6.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembanding antara teori dengan empiris. Sehingga dengan adanya perbandingan tersebut akan

lebih menambah ilmu dan pengetahuan dalam hal sistem informasi akuntansi pemberian KPR dan pengendalian internal pemberian KPR baik untuk pihak peneliti dan pihak perusahaan.

